

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi seksual anak di kedua negara dipengaruhi oleh faktor internal seperti lemahnya pengawasan orang tua, rendahnya edukasi seksual, serta faktor eksternal seperti kemiskinan, akses pornografi digital, dan lemahnya sistem perlindungan anak. Di Indonesia, kurangnya efek jera dan pengawasan hukum memperparah kasus. Di Malaysia, kendala utama terletak pada kurangnya edukasi dini dan pelaporan akibat stigma sosial. Kedua negara juga terdampak kemajuan teknologi yang memperluas modus kejahatan seksual terhadap anak, terutama secara daring. Kemiskinan dan kurangnya pendidikan meningkatkan risiko anak menjadi korban eksploitasi seksual. Selain itu, faktor sosial seperti lemahnya pengawasan orang tua dan kurangnya kesadaran masyarakat turut berkontribusi terhadap maraknya kasus ini.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual anak di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup memadai, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang TPKS, hingga PP No. 70 Tahun 2020 tentang kebiri kimia. Namun, implementasi di lapangan masih lemah, tidak konsisten, dan sering terkendala sensitivitas aparat, minimnya perlindungan psikososial, serta tidak adanya evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, Malaysia menunjukkan tingkat konsistensi yang lebih tinggi dalam penerapan hukum, khususnya melalui kombinasi hukuman penjara dan cambuk, serta kejelasan sistem peradilan anak berdasarkan Akta Kanak-Kanak 2001 dan *Sexual Offences Against Children Act 2017*.

## **B. Saran**

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual anak karena tingginya tingkat kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan pengawasan orang tua yang lemah, maka dengan meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan sosial dapat membantu mengurangi kerentanannya. Selain itu, penting untuk memperkuat edukasi seksual yang tepat usia di sekolah serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan orang tua tentang perlindungan anak. Penguatan penegakan hukum, terutama terhadap kejahatan yang melibatkan teknologi, juga sangat diperlukan untuk menanggulangi eksploitasi seksual anak secara efektif.
2. Indonesia perlu memperkuat koordinasi antar lembaga dengan membentuk mekanisme kerja lintas sektor yang terpadu untuk meningkatkan perlindungan anak. Selain itu, penting untuk memperkuat penegakan hukum melalui pelatihan aparat penegak hukum yang sensitif terhadap isu perlindungan anak, serta memastikan akses keadilan bagi korban yaitu anak. Pemerintah juga perlu mengembangkan sistem pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis teknologi, seperti pelaporan *online* yang terintegrasi dan edukasi digital, guna menjangkau lebih luas serta meningkatkan kesadaran masyarakat secara berkelanjutan.